



Risih, Dukung TP4D Dibubarkan

**LPSE Kota Jogja
Disebut Sudah Baik**

JOGIA, Radar Jogja - Rencana Jaksa Agung yang akan menghapus Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) disambut baik BPC Gapensi Kota Jogja. Terlebih kasus OTT KPK untuk proyek di Kota Jogja, juga terkait TP4D. "Sebenarnya kami agak risi dengan TP4D, seolah-olah kami seperti maling yang terus diawasi," kata Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Jogja Suharsono di sela musabab Gapensi Kota Jogja kemarin (28/11). "Seakan-akan tidak percaya.

(Jika TP4D dibubarkan) *monggo saja*," tambahnya. Suharsono mengaku, sebenarnya para pelaksana jasa konstruksi tidak masalah diawasi. Toh, lanjut dia, sebelum adanya TP4D, juga sudah diawasi oleh LSM maupun masyarakat. Gapensi juga selalu mendorong anggotanya untuk bertanggung jawab dengan pekerjaannya. "Harus dijaga kualitas pekerjaannya, karena semua mengawasi," tuturnya.

Itu pula yang diingatkannya pada anggotanya. Terlebih baru ada kasus OTT KPK pada proyek di Kota Jogja. Untuk itu dia meminta supaya semua syarat dan aturan lelang harus dipenuhi. "Aturan dan syarat jangan ditinggalkan, kualitas



Suharsono

harus dijaga, jangan sampai tersandung," pesannya. Selain keberadaan TP4D, Suharsono juga mengeluhkan terkait perizinan. Dia mencontohkan seperti sertifikasi usaha yang banyak tahapannya. Belum lagi syarat untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisa

mengenai dampak lingkungan (Amdal). "Harusnya dibedakan jasa konstruksi dengan perusahaan produksi, kalau produksi silahkan pakai Amdal, IMB," tuturnya.

Sedang Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko menilai, adanya kasus OTT KPK pada proyek konstruksi di Kota Jogja adalah dampak dari baiknya kualitas layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Kota Jogja. "LPSE paling sulit ditembus karena sistem sangat berapis, bisa ditembus kalau ada tekanan," ungkapnya.

Dia juga meminta anggota Gapensi Kota Jogja untuk meningkatkan kapasitas masing-masing. Menurut politikus PDIP itu, dengan kapasitas masing-masing pelaksana jasa konstruksi yang baik tidak akan mudah tergjur *itu-inging*. "Jasi mau ada TP4D atau tidak, tidak ada masalah," ungkapnya.

Asisten Bidang Perekonomian Setda Kota Jogja Kadri Renggono, yang mewakili Wali Kota Jogja, juga mengingatkan tentang pentingnya membangun sektor konstruksi. Yaitu memperkuat pasar konstruksi dan profesionalisme industri konstruksi.

Untuk profesionalisme industri konstruksi, Kadri mengaku di Kota Jogja sudah banyak yang mewujudkannya. Dibuktikan dengan beberapa lelang yang dimenangkan jas konstruksi dari Kota Jogja. "Dari sisi kualitas hasil pekerjaannya juga relatif bagus," kata mantan Kepala BKAD Kota Jogja itu. (cr16/pr/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3.			
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005